



KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

JL. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12740 Telp. 021 – 79172244, Faks 021 - 79172242

www.kemendes.go.id

PENGUMUMAN UNDANGAN UNTUK MEMASUKKAN PERNYATAAN BERMINAT (*Request for Expression of Interest*)

Nomor: REOI.014/PENG/JK/CQS/PJ11/KDPDT/PLN/IV/2025

Tanggal: 11 April 2025

Dalam Rangka:

**PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD)
SUBKOMPONEN 2A**

Paket Pekerjaan:

**PENYUSUNAN MODUL TPP UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN
DAN AKSI DESA BERKETAHANAN IKLIM BERBASIS LMS**

Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ):

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 11 (POKJA PEMILIHAN 11)

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/ JASA (UKPBJ)

**KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
TAHUN ANGGARAN 2025**

UNDANGAN UNTUK MEMASUKKAN PERNYATAAN BERMINAT (*Request For Expression of Interest*)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD)
Nomor Pinjaman: IBRD No. 8941-ID

**Judul Penugasan: Penyusunan Modul TPP untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Aksi Desa
Berketahanan Iklim Berbasis LMS
Reference No. ID-PPMD-481525-CS-CQS**

Pelaksanaan P3PD khususnya Sub Komponen 2A, dilakukan oleh Pusat PPMDDT sebagai *Project Implementing Unit* (PIU). Fokus kegiatan Sub Komponen 2A adalah: (i) peningkatan sistem pengelolaan TPP dengan meningkatkan kompetensi utamanya menggunakan sistem *tracking digital*, peningkatan media belajar dan adopsi aplikasi berbasis digital, dan (ii) mendorong penyederhanaan pedoman dan peraturan pelaksanaan pembangunan desa untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan partisipatif di desa.

Untuk mendukung peningkatan kapasitas TPP berbasis klasikal (konvensional) atau pelatihan tata muka, P3PD Sub Komponen 2A secara khusus memberikan dukungan untuk pengembangan metode pembelajaran berbasis aplikasi yang disebut *Learning Management System* (LMS). Pengembangan LMS diharapkan mampu melengkapi pelatihan-pelatihan berbasis klasikal, serta memberikan ruang belajar yang lebih fleksibel bagi TPP. Untuk melaksanakan pola pembelajaran berbasis LMS maka perlu dikembangkan dan/atau ditingkatkan media belajar melalui adopsi aplikasi berbasis digital.

Memasuki fase akhir dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), diperlukan kolaborasi program untuk saling mendukung dan menguatkan program. Sub komponen 2B dalam hal ini memiliki fokus pada Peningkatan Akuntabilitas Sosial dan Kapasitas Masyarakat memiliki keterbatasan pada target fasilitasi desa, maka diharapkan Peran TPP dapat Mendukung Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Dampak Perubahan Iklim.

Untuk memenuhi materi pembelajaran/kurikulum tentang Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Dampak Perubahan Iklim bagi Tenaga Pendamping Profesional perlu disusun dan dikembangkan modul pembelajaran Ketahanan Pangan dan Aksi Desa Berketahanan Iklim berbasis LMS (Metode *Blended Learning*) bagi TPP dalam menjalankan tugas pendampingan di desa.

Perusahaan Jasa Konsultan (“Konsultan”) yang berminat harus memberikan informasi yang mendukung bahwa perusahaan konsultan yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menjalankan layanan jasa tersebut di atas, misalnya: **Profil dan Legalitas Perusahaan**, serta **pengalaman dalam menjalankan layanan jasa konsultan dengan sifat dan kondisi yang sama** (nama pekerjaan, lokasi pekerjaan, nama pemberi kerja, keterangan singkat mengenai ruang lingkup pekerjaan, periode kontrak dari mulai dan berakhirnya kontrak, nilai kontrak dilengkapi dengan bukti kontrak dan BAST) dalam **kurun waktu 10 tahun terakhir (dari tahun 2015-2024)**. Adapun, kriteria yang wajib dipenuhi agar dapat dipertimbangkan untuk proses selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan berpengalaman dalam pekerjaan jasa konsultan non-konstruksi paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta;
2. Perusahaan mempunyai pengalaman pekerjaan jasa konsultansi similar/sejenis dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
3. Mempunyai nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS atau sebesar Rp 275.000.000,00.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender atau 1 bulan. Waktu mulai penugasan yang diharapkan adalah Bulan Mei 2025.

Tenaga Ahli (*Professional Staff*) tidak akan dievaluasi pada tahap ini dan oleh karena itu tenaga ahli tetap tidak perlu ditugaskan khusus pada tahap ini.

Konsultan yang berminat harap memberikan perhatian khusus pada Bagian III, paragraf, 3.14, 3.16, dan 3.17 World Bank's "*Procurement Regulations for IPF Borrowers*" Juli 2016, yang direvisi November 2017 dan Agustus 2018 ("*Procurement Regulation*"), yang menjelaskan kebijakan Bank Dunia terkait konflik kepentingan.

Konsultan dapat bermitra/bekerjasama dengan perusahaan lain dalam bentuk *Joint Venture* (Kerjasama Operasi/KSO) atau sub-konsultan guna meningkatkan kualifikasinya. Hanya 1 (satu) Pernyataan Minat/EOI boleh disampaikan oleh Konsultan baik sebagai Konsultan Tunggal ataupun sebagai bagian dari JV/KSO. Jika satu perusahaan konsultan ikut serta di lebih dari 1 (satu) Pernyataan Minat/EOI (sebagai contoh: jika perusahaan konsultan menyampaikan EOI sebagai Konsultan Tunggal dan juga sebagai bagian/anggota JV/KSO dalam EOI yang lain), maka semua Pernyataan Minat/EOI tersebut akan ditolak. Kualifikasi dari sub-konsultan tidak akan diperhitungkan dalam evaluasi pernyataan minat.

Konsultan akan dipilih sesuai dengan metode Seleksi Berdasarkan Kualifikasi Konsultan/CQS (*Consultant Qualification Selection*) sesuai dengan *Procurement Regulations*.

Konsultan yang berminat dapat memperoleh satu set dokumen Permintaan Pernyataan Minat (REOI) (termasuk TOR) dan Form Penyampaian Pengalaman melalui tautan berikut: <https://s.id/modulTPP>

Dimohon kepada peserta agar menyampaikan *List* Pengalaman sesuai *template file excel* (format xls) terlampir pada Lumbung *File* Kemendesa.

Pernyataan Minat beserta dokumen pendukung lainnya harus dikirimkan langsung ke alamat *e-mail* Pokja Pemilihan 11 di bawah ini paling lambat tanggal 25 April 2025 pukul 15.00 WIB (GMT +7).

Informasi tambahan dapat diminta melalui alamat dibawah ini pada hari dan jam kerja jam kerja mulai dari pukul 08.00 WIB sampai 15.00 WIB.

Kelompok Kerja Pemilihan 11 (Pokja Pemilihan 11)

Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ)

Address : UKPBJ Kementerian Desa dan PDT

Gedung Utama Lantai 6

Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan 12750

Telephone : ~

E-mail : lms-pd@kemendesa.go.id